**MENCARI SISTEM PEMIDANAAN YANG TEPAT DALAM TATA HUKUM PIDANA
DI INDONESIA KHUSUSNYA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh
Dadi Waluyo*)**

Abstrak

Sejak diundangkannya hingga saat ini, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kini telah berlaku selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun. Dalam kurun waktu itu, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah digunakan untuk menjerat dan mempidana kepada banyak pelaku tindak pidana korupsi. Adanya ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipandang sebagian kalangan telah membelenggu kebebasan hakim. Hal ini disebabkan hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus jika telah terbukti suatu perbuatan dilakukan oleh terdakwa. Sebagai contoh, jika seorang terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), meskipun banyak hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa, maka hakim tetap harus berpedoman pada ancaman pidana minimum khusus dari pasal 2 ayat (1) tersebut, yaitu 4 (empat) tahun. Di satu sisi ancaman pidana minimum khusus dianggap membelenggu kebebasan hakim, namun di sisi yang lain ancaman pidana minimum khusus ini akan mencegah disparitas dalam penjatuhan pidana. Disparitas dalam penjatuhan pidana ini sering dijumpai pada tindak pidana yang dijerat dengan KUHP.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi

A. PENDAHULUAN

Adalah suatu keniscayaan jika suatu peraturan atau undang-undang akan selalu tertinggal dengan perubahan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, suatu peraturan atau undang-undang akan selalu memerlukan perbaikan ataupun penyempurnaan seiring berjalannya waktu.

Perbaikan atau penyempurnaan itu dapat dilakukan dengan cara merubah atau menambah, namun dapat pula berupa penggantian secara keseluruhan, artinya undang-undang lama dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan undang-undang yang baru.

Salah satu contoh perbaikan atau penyempurnaan dengan cara merubah atau menambah adalah perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan yang mengganti secara keseluruhan adalah dari Undang-undang No. 3 Tahun 1971 menjadi Undang-undang No. 31 Tahun 1999.

Dalam konsideran huruf c Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan:

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum
Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi¹.

Berdasarkan konsideran tersebut, maka ada beberapa masalah yang ditemukan dalam undang-undang lama, sehingga membangkitkan semangat untuk melahirkan undang-undang baru menggantikan undang-undang yang lama. Beberapa masalah itu antara lain :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat atau dengan kata lain sudah ketinggalan jaman;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 sudah tidak efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Diakui atau tidak, lahirnya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah didorong tumbangnya rezim orde baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Rezim yang selama ini dianggap telah banyak melakukan penyelewengan maupun pelanggaran.

Namun baru diberlakukan kurang lebih 2 (dua) tahun saja, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ditemukan banyak kelemahan dan kekurangan. Adanya kelemahan dan kekurangan ini memaksa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah duduk

bersama kembali untuk memperkuat kelemahan dan menambah kekurangan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dengan cara melakukan perubahan.

Tujuan perubahan tersebut dapat terlihat dalam konsideran huruf b Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan:

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi².

Dari konsideran Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terbaca, motivasi untuk melakukan perubahan adalah:

1. Untuk menjamin kepastian hukum
2. Menghindari keragaman penafsiran hukum
3. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial sosial dan ekonomi
4. Perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Konsideran ini sepertinya menegaskan, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 kurang memberikan kepastian hukum, multi tafsir, kurang memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi, serta kurang memberikan perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Dengan telah ditutupnya kelemahan dan kekurangan Undang-undang

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nomor 31 Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka penyebutan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Ini berarti, kedua undang-undang tersebut berlaku bersama-sama.

Semangatnya tentu saja, dengan berlakunya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi dapat diberantas atau setidaknya dapat ditekan seminimal mungkin. Apakah semangat itu sudah memenuhi apa yang diharapkan? Inilah yang menjadi kajian bersama dan menjadi bahan diskusi para akademisi dan juga para praktisi.

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang permasalahan tersebut, maka untuk membatasi ruang lingkup pembahasan tulisan ini akan difokuskan pada dua pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah efektivitas penjatuh pidana dalam menekan tindak pidana korupsi?
2. Sistem pemidanaan yang bagaimanakah yang diharapkan ke depan mampu mencegah dan juga memberantas tindak pidana korupsi?

B. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penjatuh Pidana Dalam Menekan Tindak Pidana Korupsi

Sejak diundangkannya hingga saat ini, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kini telah berlaku selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun. Dalam kurun waktu itu, Undang-undang Pemberan-

tas Tindak Pidana Korupsi telah digunakan untuk menjerat dan mempidana kepada banyak pelaku tindak pidana korupsi.

Sebagaimana diketahui, bahwa Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan *lex specialis* karena sebenarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga telah diatur pasal-pasal dengan kualifikasi korupsi seperti dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP. Dengan demikian, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 lah yang akan dipergunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi.

Keunikan lain Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah, undang-undang ini juga telah mengatur hukum formil (hukum acara) dalam undang-undang tersebut.

Sesuai dengan isinya secara keseluruhan, ia terdiri dari peraturan tentang hukum pidana materiel dan hukum pidana formel. Hukum pidana materiel tercantum dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara itu, hukum pidana formel tercantum dalam Pasal-pasal 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001³.

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan*

Ini berarti, sepanjang telah diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka ketentuan undang-undang lain yang mengatur hal yang sama dengan undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut akan dikesampingkan.

Hal yang juga menarik dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dicantumkannya ancaman pidana minimum khusus, sesuatu yang tidak ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain ancaman pidana minimum khusus, dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dimungkinkan penjatuhannya pidana mati. Pidana mati dapat dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi jika terpenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (2).

Adanya ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipandang sebagian kalangan telah membelenggu kebebasan hakim. Hal ini disebabkan hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus jika telah terbukti suatu perbuatan dilakukan oleh terdakwa. Sebagai contoh, jika seorang terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), meskipun banyak hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa, maka hakim tetap harus berpedoman pada ancaman pidana minimum khusus dari pasal 2 ayat (1) tersebut, yaitu 4 (empat) tahun.

Di satu sisi ancaman pidana minimum khusus dianggap membelenggu kebebasan hakim, namun di sisi yang

lain ancaman pidana minimum khusus ini akan mencegah disparitas dalam penjatuhan pidana. Disparitas dalam penjatuhan pidana ini sering dijumpai pada tindak pidana yang dijerat dengan KUHP. Sebagai contoh, terdakwa A dan terdakwa B didakwa mencuri sepeda motor. Merk sama, tahun sama, cara melakukan kejahatan juga sama, namun diperiksa Majelis Hakim yang berbeda. Pada saat vonnis, maka A dijatuhi pidana 8 (delapan) bulan sementara B dijatuhi pidana 2 (dua) tahun. Apakah hal ini keliru? Jika dikaji berdasarkan ancaman pidana, maka apa yang dijatuhkan oleh kedua Majelis Hakim itu tidak ada yang keliru, karena KUHP tidak mengatur adanya ancaman pidana minimum khusus, sehingga Majelis Hakim bebas dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman kepada terdakwa. Yang tidak diperbolehkan adalah jika Majelis Hakim menjatuhkan pidana melebihi ancaman pidana maksimumnya.

Berawal dari disparitas itulah, maka Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan ancaman pidana minimum khusus di hampir seluruh pasal ancaman pidana. Beratnya ancaman pidana minimum khusus yang diberikan pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan mempunyai daya cegah “*deterrence*” bagi siapapun untuk tidak coba-coba melakukan korupsi.

Terminologi “*deterrence*” menurut **Zimring** dan **Hawkins**, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, di mana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Namun “*the net deterrence effect*” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak

Internasional, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. Ke-7, 2015, hal. 26

melakukan kejahatan⁴. Tujuan pembedanaan sebagai *deterrence effect* sebenarnya telah menjadi sarana yang cukup lama dalam kebijakan penanggulangan kejahatan karena tujuan *deterrence* ini berakar dari aliran klasik tentang pembedanaan, dengan dua tokoh utamanya, yaitu **Cesare Beccaria** (1738 – 1794) dan **Jeremy Bentham** (1748 – 1832). **Beccaria** menegaskan dalam bukunya yang berjudul *dei Delitti e Delle Pene* (1764) bahwa tujuan pembedanaan adalah untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan, dan bukan sebagai sarana balas dendam masyarakat⁵.

Namun fakta masih ada saja pihak yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fakta adanya pihak yang tertangkap tangan KPK tidaklah serta merta membuktikan kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia, namun ini membuktikan bahwa ancaman pidana minimum khusus dan juga ancaman pidana tambahan lainnya belum mampu mencegah orang untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Berarti ada yang salah dalam penegakkan hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Jika berjalan sesuai dengan semangat disahkannya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 harusnya tindak pidana korupsi terus mengalami penurunan. Adanya peningkatan perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya permasalahan dalam penegak-

kan hukum. Apakah itu terkait dengan kualitas undang-undang atau aparat penegak hukumnya?

Indonesian Corruption Watch merelease hasil survey terkait putusan pengadilan terhadap perkara korupsi. Pada 2018, ICW berhasil melakukan pemantauan terhadap 1.053 perkara dengan 1.162 terdakwa, dengan total pidana denda sebesar Rp. 119.884.000.000, dengan total pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 838.547.394.511,34, USD. 5.512.431, dan RM 27.400. Dari pengolahan seluruh putusan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang kami pantau tersebut, didapatkan rata-rata keseluruhan putusan untuk perkara terdakwa perkara korupsi pada 2018 adalah selama 2 tahun 5 bulan⁶.

2. Rumusan Ancaman Pidana Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, menganut sistem perumusan ancaman pidana yang bersifat kumulatif dan Kumulatif-Alternatif. Sistem ini berbeda dengan yang dianut dalam KUHP. KUHP menganut sistem perumusan ancaman pidana Tunggal dan Alternatif. Apa yang membedakan dalam perumusan ancaman pidana yang bersifat Kumulatif dan Kumulatif-Alternatif dengan perumusan ancaman pidana yang bersifat Tunggal dan Alternatif.

Perumusan ancaman pidana yang bersifat Kumulatif mengandung pengertian, Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa sifatnya kumulatif. Contohnya, menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat)

⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kesatu, 201, hal. 50.

⁵ *Ibid*, hal. 51.

⁶ <https://www.antikorupsi.org>, diunduh tanggal 3 Juli 2019.

tahun penjara dan denda sebanyak Rp. 50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah). Sebagai perbandingan, jika dibandingkan dengan rumusan ancaman pidana secara alternatif dalam KUHP, maka akan nampak perbedaan yang sangat mencolok. Penjatuhan pidana/vonis oleh Majelis Hakim berdasarkan rumusan ancaman pidana alternatif mempunyai konsekwensi Majelis Hakim harus memilih salah satu pidana yang diancamkan, apakah pidana penjara? **Atau** kah pidana denda? Ada yang dapat dipilih oleh Jaksa dalam menuntut dan Hakim dalam memutus.

Lain halnya jika rumusan ancaman pidana yang bersifat Kumulatif –Alternatif. Rumusan ini ditandai dengan kata "dan/atau" dalam rumusan ancaman pidananya. Contoh: Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24. Hal ini tidak akan dijumpai dalam rumusan ancaman pidana KUHP. Jika sebelumnya diuraikan tentang ancaman pidana dalam KUHP yang bersifat alternatif, maka ini yang dirumuskan dalam bentuk Tunggal. Rumusan ancaman pidana yang berbentuk tunggal, artinya Jaksa dalam menuntut, Hakim dalam menjatuhkan vonnis, hanya dapat menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang tersedia dalam ancaman pasal tersebut, apakah denda saja? apakah penjara saja? Tidak ada pilihannya.

Rumusan ancaman pidana dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya sudah cukup memadai dengan adanya ancaman pidana minimum khusus. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan. Contohnya: terpidana yang masih dapat berkeliaran di luar lembaga pemasyarakatan di luar waktu-waktu yang diijinkan. Tentu masih ingat dengan Gayus

Tambunan yang tertangkap kamera sedang melihat pertandingan tennis di Bali, atau Setya Novanto yang sedang jalan-jalan di Toko Bangunan di Bandung. Hal ini tentu membuat miris, bagaimana tidak? Orang yang berstatus terpidana dapat dengan santainya berkeliaran di tempat yang bukan semestinya dia harus berada.

Integrated criminal justice system mensyaratkan gerak yang padu antara Penyidik (Polri, KPK dan Kejaksaan), Penuntut (KPK dan Kejaksaan), Pengadilan (Hakim) dan Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu, diperlukan kerjasama antar subsistem-subsistem tersebut. Hal krusial yang menjadi fokus saat ini adalah di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, harus dicari cara yang tepat untuk menangani para pelaku tindak pidana korupsi yang telah berstatus sebagai terpidana agar dapat menjalankan pidananya sebagaimana mestinya.

3. Sistem Pemidanaan Yang Diharapkan Kedepan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang *over capacity* (melebihi daya tampung) seperti sudah menjadi cerita yang tak berujung dengan segala dilematikanya. Menempatkan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah hal yang tepat, setidaknya untuk saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Harus diakui, Lembaga Pemasyarakatan adalah subsistem yang paling lama bergelut dengan pelaku pidana. Penyidikan ada batas waktu penahanannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, paling lama dua puluh hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama empat puluh hari (terbatas). Penuntutan pun ada batas masa penahanannya sebagaimana

diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, paling lama dua puluh hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama tiga puluh hari (terbatas). Pemeriksaan Persidangan juga ada batas waktu penahanannya sebagaimana diatur dalam Pasal 26, 27 dan 28 KUHAP yang jika dijumlahkan secara keseluruhan dari tahap penyidikan sampai dengan Mahkamah Agung masa penahanan itu berjumlah 400 (empat ratus) hari.

Lembaga Pemasyarakatan membina warga binaan, batas waktunya adalah sesuai putusan hakim. Ada yang 5 (lima) tahun, ada yang 10 (sepuluh) tahun, ada yang 20 (dua puluh) tahun, bahkan ada pula yang seumur hidup. Rentang waktunya jauh lebih lama jika dibandingkan masa penahanan dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan.

Lamanya terpidana atau yang dalam bahasa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan, memerlukan strategi yang baik untuk mengelolanya. Hal ini diperlukan karena Lembaga Pemasyarakatan pasti sangat kompleks permasalahannya.

Kompleksitas permasalahan Lembaga Pemasyarakatan disebabkan karena Lembaga Pemasyarakatan menampung semua pelaku tindak pidana, baik pelaku tindak pidana umum maupun pelaku tindak pidana khusus dijadikan satu. Belum lagi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi daya tampungnya, ini semakin meningkatkan kompleksitas masalah di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan pada gilirannya hanya berusaha membuat suasana kondusif saja dan tidak seratus persen melakukan pembinaan. Ini dilakukan supaya tidak terjadi

gesekan yang dapat menimbulkan kericuhan atau keributan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Medan yang terjadi baru-baru ini adalah sebagai bukti betapa mudahnya para warga binaan tersulut emosinya.

Salah satu strategi yang dijalankan oleh Kementerian Hukum dan Perundang-undangan adalah memisahkan warga binaan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan, seperti Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika (Cipinang) dan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin (warga binaan tindak pidana korupsi). Jelas ini adalah bukti adanya diskriminasi terhadap warga binaan.

Strategi ini terbukti tidak efektif dalam membina warga binaan. Ini terbukti dari masih banyaknya jaringan narkotika yang justru dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang. Ada juga warga binaan Lembaga Sukamiskin yang jalan-jalan ke luar Lembaga Pemasyarakatan di luar ijin-ijin yang resmi. Bahkan belakangan justru Kepala Lembaga Pemasyarakatannya (Sukamiskin) yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait gratifikasi.

Untuk itu, diperlukan strategi khusus dalam membina warga binaan, tidak perlu dipisah-pisahkan berdasarkan jenis tindak pidananya, namun cukup dibuat setiap Lembaga Pemasyarakatan tidak melebihi kapasitas daya tampungnya. Pendekatan terhadap warga binaan oleh petugas LAPAS harus lebih humanis.

Strategi selanjutnya adalah membentuk lembaga yang bertugas meneliti latar belakang pelaku. Hal ini untuk menentukan pembinaan seperti apa yang akan diberikan kepada warga binaan tersebut. Dalam hal pelaku

tindak pidana korupsi harus diteliti secara mendalam, apa motivasi yang melatarbelakangi pelaku melakukan korupsi?

Peran serupa telah ada di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Apabila dalam peradilan anak BAPAS dimintai pertimbangan dan saran untuk penjatuhan sanksi ke Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH), maka dalam pembinaan warga binaan pelaku korupsi, lembaga ini dapat memberikan pertimbangan dan saran terkait cara pembinaan/penanganan terhadap warga binaan tersebut.

Konsekwensinya, yang pertama ada lembaga baru yang berarti juga harus ada sumber daya manusia yang baru sebagai “**Pembimbing Kemasyarakatan**” pada BAPAS dan yang kedua, penanganan warga binaan menjadi sangat variatif yang memungkinkan warga binaan yang satu dengan warga binaan yang lainnya berbeda-beda.

Sebagai suatu wacana, maka hal tersebut di atas sangat patut untuk dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas Lembaga Pemasyarakatan dan juga tercapainya tujuan dari penjatuhan pidana.

C. PENUTUP

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang cenderung ringan-ringan berdampak negatif dalam penegakkan hukum perkara korupsi. Hal ini terbukti masih tingginya tindak pidana korupsi yang ditangani KPK.

Pemidanaan yang menempatkan secara khusus pelaku tindak pidana korupsi justru membuat warga binaan perkara korupsi seperti eksklusif, mereka beda dengan pelaku tindak lainnya.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku korupsi haruslah pidana yang berat sesuai dengan jenis kejahatannya yang disebut *extra ordinary crime*, maka pejatuhan pidananya juga *extra ordinary punishment*.

Pemidanaan haruslah ditempatkan di tempat yang sama, tanpa membedakan berdasarkan jenis tindak pidananya. Ini untuk menunjukkan persamaan di muka hukum. Tidak ada yang eksklusif semua warga binaan mendapatkan hak yang sama.

D. DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan teori Peradilan*. Jakarta. Kencana. 2009.
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Korupsi*. UII PRESS. Yogyakarta. 2016.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2015.
- Marlina. *Hukum Penitensier*. PT. Refika Aditama, Bandung. 2011.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung. 2006.
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016.

Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001

Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Undang-undang nomor : 12 Tahun
1995 Tentang Pemasyarakatan.

Internet:

<http://smslap.ditjenpas.go.id>.
www.hukumonline.com